

Implementasi *Risk Assessment* atas Teknologi Informasi di Divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menggunakan ISO 27005:2008

Implementation of Risk Assessment of Information Technology in the Land Infrastructure Division of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Defense Agency Using ISO 27005:2008

1st Harry Andrian
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia

harryandrian@student.telkomuniversity.ac.id

2nd Rokhman Fauzi
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia

rokhmanfauzi@telkomuniversity.ac.id

3rd Ryan Adhitya Nugraha
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia

ranugraha@telkomuniversity.ac.id

Abstrak—Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika tentang Pusat Koordinasi Penanganan Insiden Keamanan Informasi Pemerintahan. Pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 di jelaskan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Kementrian dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas ATR/BPN memiliki penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan TI dan proses bisnis pada divisi Infrastruktur Pertanahan. Akan tetapi, penerapan tersebut belum sepenuhnya menilai adanya ancaman pada aset TI di divisi Infrastruktur Pertanahan dan menilai seberapa jauh kontrol yang sudah ada dapat mengurangi ancaman maupun risiko yang akan datang serta dampaknya. Implementasi dan penilaian risk assessment terhadap aset TI dilakukan menggunakan ISO 27005 yang difokuskan untuk melakukan pengelolaan/kontrol terhadap risiko TI. Penerapan risk assessment dilakukan dengan mengacu pada risk scenario pada ISO 27005. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi risk scenario pada aset TI berdasarkan penilaian kontrol yang ada

Kata Kunci—ISO 27005, *risk assessment*, *risk scenario*, ISO 27001, *level of risk*, *risk treatment*.

Abstract—PT. In accordance with the Regulation of the Minister of Communication and Information concerning the Coordinating Center for Handling Government Information Security Incidents. In Law Number 41 Year 2007 the General Guidelines for Information Technology and National Communication Management. And the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency are Non-Ministry Government Agencies which are under and accountable to the President and lead by the Head. (In accordance with Presidential Regulation No. 63 of 2013). The Ministry and Spatial Planning / National Land Agency has the duty to carry out in the national, regional and sectoral land sector in accordance with the laws and regulations. The ATR / BPN Office has the application of risk management in IT management and business processes in the Land Infrastructure division. However, the application has not fully assessed the threat to IT assets in the Land Infrastructure division and assessed the extent to which existing controls can reduce future threats and risks and their impact. Implementation and This research was conducted by identifying risk scenarios on IT assets based on the assessment of controls that exist

Keywords—ISO 27005, risk assessment, risk scenario, ISO 27001, level of risk, risk treatment.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas permasalahan yang ada di Dinas ATR/BPN. Berdasarkan data dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai divisi teknologi informasi. Kondisi *risk assessment* yang ada yaitu sudah melakukan identifikasi ancaman pada proses bisnis yang terjadi sebelumnya, *treatment* yang dilakukan sebagai antisipasi terhadap ancaman yang terjadi sebelumnya, belum adanya penilaian kontrol *existing*, belum adanya penilaian dampak terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Dalam menilai risiko berdasarkan *risk assessment* meliputi identifikasi risiko (aset, ancaman, kontrol *existing*, konsekuensi), analisis risiko (penilaian konsekuensi, penilaian kemungkinan ancaman, penentuan nilai risiko), evaluasi risiko, penanggulangan risiko. Dinas ATR/BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh

Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Kementrian dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan di bidang Pertanahan secara nasional, regional dan sectoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena risiko permasalahan yang sering terjadi itu ada beberapa poin, yang pertama adalah tentang keamanan informasi yang kurang terjaga oleh pihak *internal* maupun *eksternal*, seperti mendokumentasikan hal-hal yang ada di perusahaan ini. Padahal nyatanya perusahaan ini bersifat rahasia dan tidak boleh sembarang berfoto atau bervideo di dalam lingkungan perusahaan. Lalu poin selanjutnya adalah tentang kepatuhan terhadap *license* yang masih kurang disadari oleh para pegawai di dalamnya. Dinas ATR/BPN memiliki aset-aset penting di dalamnya, seperti yang dilampirkan pada tabel dibawah ini: [7]

TABEL 1
DAFTAR ASET TEKNOLOGI INFORMASI DINAS ATR/BPN

No.	Jenis Aset TI
1	Aset Dokumen
2	Aset Hardware

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Dinas ATR/BPN memiliki aset TI utama. Mengingat TI merupakan aset penting dalam operasional. Aset TI tersebut perlu diketahui nilai-nilai ancaman yang mungkin terjadi dan dikaitkan dengan penilaian kontrol *existing*, sehingga mengurangi kegagalan pencapaian tujuan dan misi perusahaan yang berdampak pada ketidakpercayaan publik atas pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi secara sistematis.

II. KAJIAN TEORI

A. ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 merupakan dokumen Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau Information Security Management Systems (ISMS) yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang seharusnya dilakukan dalam usaha pengimplementasian konsep-konsep keamanan informasi di perusahaan.

Standar internasional ini telah dipersiapkan untuk menyediakan sebuah model pembangunan, penerapan, pengerjaan, pengawasan, peninjauan, pemeliharaan, peningkatan sebuah SMKI. Standar ini mengadopsi model Plan Do-Check-Act (PDCA) yang diterapkan untuk menyusun sebuah proses SMKI [1].

B. ISO/IEC 27005

Menurut ISO/IEC 27005 berfokus pada analisis risiko, selanjutnya tahapan menuju pemilihan terhadap kontrol keamanan. ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002 lebih menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan dan operasi terhadap kontrol keamanan. Proses manajemen risiko keamanan informasi terdiri dari *context*

establishment, *risk assessment*, *risk treatment*, *risk acceptance*, *risk communication*, *risk monitoring* and *review* [6].

C. Risk Assessment

Risk assessment menentukan nilai pada aset informasi, mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kerentanan yang dapat terjadi, mengidentifikasi kontrol dan efeknya pada risiko yang teridentifikasi, menentukan konsekuensi potensial dan akhirnya memprioritaskan risiko yang telah diperoleh dan menggolongkan pada kriteria evaluasi risiko yang diatur dalam *establishment context*. Tahapan pada *risk assessment* terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko [6].

III. METODE

A. Model Konseptual

Model Konseptual adalah konsep yang digunakan penulis untuk membantu penelitiannya. Model konseptual pada Tugas Akhir ini adalah mengenai implementasi *risk assessment*. Model konseptual ini didasari oleh permasalahan yang terdapat pada divisi Infrastruktur Pertanahan ATR/BPN, di mana permasalahan itu ialah belum adanya penilaian risiko serta belum adanya rekomendasi *risk treatment* yang sesuai. Pelaku yang terlibat dalam lingkungan ialah pegawai di divisi Infrastruktur Pertanahan ATR/BPN. Untuk melakukan penelitian ini, digunakan dasar ilmu seperti manajemen risiko serta metode yang digunakan adalah ISO 27005. Penelitian ini akan menghasilkan implementasi *risk assessment* dengan ISO 27005. Untuk evaluasi adanya *checklist* ISO 27005.

B. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman untuk memecahkan masalah pada penelitian ini, Berikut adalah sistematika yang digunakan pada penelitian ini.

1. Tahap inisiasi dilakukan untuk penentuan ruang lingkup terhadap penelitian Tugas Akhir ini. Penentuan meliputi perumusan masalah, batasan, tujuan penelitian, studi lapangan melalui wawancara pada salah satu pegawai di divisi Infrastruktur Pertanahan ATR/BPN, serta studi pustaka menggunakan ISO 27005:2008 dan ISO 27001:2005 sebagai pendukungnya.
2. Pada tahap pengumpulan data dilakukan pembuatan draf pertanyaan mengenai kondisi saat ini di divisi Infrastruktur Pertanahan ATR/BPN. Setelah itu dilakukan verifikasi kepada Dinas ATR/BPN, apakah pertanyaan dapat diterima atau tidak. Jika pertanyaan diterima maka akan dilakukan wawancara serta perusahaan juga memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
3. Tahap pelaporan dilakukan setelah melakukan proses penilaian risiko, yaitu menyusun dokumen perbaikan yang berisikan tentang profil risiko berupa *level of risk* yang berisikan nilai risiko, *risk response* yang dikaitkan dengan dokumen *risk appetite* (selera risiko) dari perusahaan dengan maksud risiko mana yang dapat diterima oleh perusahaan dan risiko mana yang tidak dapat diterima, kemudian menentukan strategi *risk treatment* yang dapat mengurangi kemungkinan terjadi suatu ancaman atau dampak dari terjadinya ancaman yang menyebabkan kerugian bagi Dinas ATR/BPN.
4. Pada tahap ini dilakukan penilaian *risk assessment* berdasarkan ISO 27005:2008 dan untuk menentukan skenarionya menggunakan kontrol dari ISO 27001:2005. Proses *risk assessment* dilakukan dengan beberapa proses yaitu Penentuan *probability*, *Impact* dan identifikasi ancaman apa saja yang bakal terjadi di divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas ATR/BPN setelah melihat kondisi saat ini. Selanjutnya tahap verifikasi dan validasi *risk assessment*. Verifikasi dilakukan untuk melihat *risk assessment* yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang dijadikan acuan atau tidak, sedangkan validasi dilakukan untuk memberikan hasil *risk assessment* kepada divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas ATR/BPN, untuk mengetahui apakah penilaian tersebut dapat diimplementasikan. Apabila *risk assessment* tersebut tidak disetujui oleh divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas ATR/BPN, maka dilakukan *risk assessment* kembali.
5. Setelah disetujui hasil *risk assessment* tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu

melakukan *level of risk* untuk setiap aset dan *risk treatment* untuk memberikan rekomendasi dari aset yang dimitigasi. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran terhadap divisi Infrastruktur Pertanahan ATR/BPN dan penelitian selanjutnya.

IV. PENGOLAHAN DATA

A. Penetapan Konteks

Penetapan konteks merupakan ruang lingkup terhadap kajian risiko yang akan dilakukan pada *risk assessment*. *Assessment* yang dilakukan yaitu pada aset TI. Aset TI yang akan dibahas berdasarkan data yaitu aset-aset kritis seperti dokumen dan *hardware*. Penetapan konteks akan dilakukan pengelompokan aset dengan unit kerja sebagai penentuan nilai aset. Kemudian, penentuan kriteria perhitungan dalam melakukan *assessment* berupa analisis tingkat kemungkinan kejadian saat ini dan penilaian dampak terhadap aset perusahaan. Dalam melakukan *assessment*, kriteria perhitungan risiko mencakup *likelihood* dan *impact* yang digunakan untuk mendapatkan nilai risiko terhadap aset TI di divisi Infrastruktur Pertanahan ATR/BPN. Kemudian, nilai risiko dari hasil perhitungan akan disesuaikan dengan selera risiko di perusahaan yaitu *risk appetite* (selera risiko) untuk menentukan *risk response* terhadap suatu risiko.

B. Identifikasi Risiko

Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menentukan apa yang bisa terjadi untuk menyebabkan potensi kerugian, dan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana, dimana dan mengapa kerugian mungkin terjadi. Dalam mengidentifikasi risiko, berdasarkan ISO 27005 memiliki tahapan diantaranya: identifikasi aset dan identifikasi ancaman.

1. Identifikasi Aset

Proses penilaian pada aset TI dilakukan dengan melakukan wawancara pada salah satu pegawai divisi Infrastruktur Pertanahan, yang dimiliki oleh Dinas ATR/BPN. Berikut daftar aset TI dengan hubungan proses bisnis yang dicantumkan pada tabel 2. sebagai berikut:

TABEL 2
DATA ASET TEKNOLOGI INFORMASI

Aset	Jenis
Dokumen	Strategis
	Teknis
	Administratif
Hardware	Server
	Network

2. Identifikasi Ancaman

Ancaman yang digunakan untuk melakukan implementasi dan penilaian *risk assessment* mengacu pada *risk scenario* menurut ISO 27005:2008 yang telah disesuaikan dengan jenis aset TI di perusahaan, sebagai berikut:

TABEL 3
DAFTAR ANCAMAN ASET TI
(SUMBER: ISO 27005:2008)

Jenis Ancaman	Skenario Ancaman	Threat ID
Kerusakan Fisik	Kebakaran	T1
	Kerusakan karena kebocoran	T2
	Perusakan pada peralatan atau media	T3
Peristiwa Alam	Badai	T4
	Gempa bumi	T5
	Banjir	T6
Kehilangan layanan yang penting	Hilangnya pasokan listrik	T7
	Kegagalan peralatan telekomunikasi	T8
Kompromi Akan Informasi	Memata-matai dari jauh	T9
	Menguping	T10
	Pencurian media atau dokumen	T11
	Data dari sumber yang tidak dapat dipercaya	T12
	Gangguan perangkat keras	T13
	Gangguan perangkat lunak	T14
Kegagalan Teknis	Kegagalan peralatan	T15
	Kerusakan peralatan	T16
	Kejenuhan sistem informasi	T17
	Kerusakan perangkat lunak	T18
	Pelanggaran pemeliharaan sistem informasi	T19

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian Risiko

Penilaian risiko yang digunakan ialah *level of risk* yang dikaitkan antara *likelihood* dengan *impact* yang telah disesuaikan dengan penilaian kerentanan, risiko dan kontrol *existing*. Untuk mengetahui nilai *level of risk*, berdasarkan nilai dampak sebagai pengaruh ancaman terhadap kegiatan operasional perusahaan. *Level of risk* dapat diketahui dengan menyesuaikan peta tingkat risiko

perusahaan pada bab mengenai penetapan konteks sebelumnya. Maka, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Aset Dokumen

Level of risk didapati dari rekomendasi dan kesepakatan dengan pihak Dinas ATR/BPN, dengan cara membandingkan ancaman, kerentanan, kontrol *existing* dan risiko. Berdasarkan perbandingan tersebut bisa kita dapatkan nilai *likelihood X impact*. Berikut tabel nilai risiko pada aset dokumen:

TABEL 4
NILAI RISIKO PADA ASET DOKUMEN

Jenis Aset	Threat ID	Ancaman	Level Of Risk
Strategis, Teknis, dan Administratif	T4	Badai	[16] Tinggi
	T5	Gempa Bumi	[20] Ekstrem
	T6	Banjir	[5] Moderat
	T9	Memata-matai dari jauh	[8] Moderat
	T10	Menguping	[8] Moderat
	T11	Pencurian media atau dokumen	[4] Moderat
	T12	Data dari sumber yang tidak dapat dipercaya	[4] Moderat

2. Aset Hardware

Level of risk didapati dari rekomendasi dan kesepakatan dengan pihak Dinas ATR/BPN, dengan cara membandingkan ancaman, kerentanan, kontrol *existing* dan risiko.

Berdasarkan perbandingan tersebut bisa kita dapatkan nilai *likelihood X impact*. Berikut tabel nilai risiko pada aset hardware:

TABEL 5
NILAI RISIKO PADA ASET HARDWARE

Jenis Aset	Threat ID	Ancaman	Level Of Risk	
Server	T4	Badai	[16] Tinggi	
	T5	Gempa Bumi	[20] Ekstrem	
	T6	Banjir	[5] Moderat	
	T1	Kebakaran	[12] Tinggi	
	T2	Kerusakan karena kebocoran	[10] Tinggi	
	T3	Perusakan pada peralatan atau media	[4] Moderat	
	T10	Menguping	[8] Moderat	
	T13	Gangguan perangkat keras	[4] Moderat	
	Network	T7	Hilangnya pasokan listrik	[4] Moderat
		T8	Kegagalan peralatan telekomunikasi	[4] Moderat
T9		Memata-matai dari jauh	[8] Moderat	
T11		Pencurian media atau dokumen	[4] Moderat	

B. Risk Treatment

Rekomendasi *Risk Treatment* terhadap hasil nilai risiko yang perlu dimitigasi. Penentuan *treatment* berdasarkan jenis ancamannya sebagai kontrol untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman dan dampak kejadian suatu ancaman. Maka, *treatment* yang diusulkan sebagai berikut:

1. Aset Dokumen

Hasil akhir dari *level of risk* yaitu menentukan *risk response* untuk setiap ancamannya. Untuk *risk response* yang ada pada aset dokumen hanya ada 2 tipe yaitu *mitigate* atau upaya mengurangi risiko dan *retention* atau menerima risiko tersebut. *Risk treatment* didapati berdasarkan hasil rekomendasi dan kesepakatan pada pihak divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas ATR/BPN. Berikut tabel rekomendasi *risk treatment* pada aset dokumen:

TABEL 7
RISK TREATMENT ASET DOKUMEN

Threat ID	Ancaman	Level Of Risk	Risk Response	Risk Treatment
T4	Badai	[16] Tinggi	Mitigate	Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain.
T5	Gempa Bumi	[20] Ekstrem	Mitigate	Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain. Penanggulangan terhadap risiko dapat mengurangi efek pada dampak dan organisasi masih dapat berjalan seperti biasanya.
T6	Banjir	[5] Moderat	Mitigate	Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain.

2. Aset Hardware

Hasil akhir dari *level of risk* yaitu menentukan *risk response* untuk setiap ancamannya. Untuk *risk response* yang ada pada aset *hardware* hanya ada 2 tipe yaitu *mitigate* atau upaya mengurangi

risiko dan *retention* atau menerima risiko tersebut. *Risk treatment* didapati berdasarkan hasil rekomendasi dan kesepakatan pada pihak divisi Infrastruktur Pertanahan Dinas ATR/BPN. Berikut tabel rekomendasi *risk treatment* pada aset *hardware*:

TABEL 8
RISK TREATMENT ASET HARDWARE

Threat ID	Ancaman	Level Of Risk	Risk Response	Risk Treatment
T4	Badai	[16] Tinggi	Mitigate	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain. Asuransi seluruh <i>hardware</i> untuk mengurangi biaya dampak kerusakan.
T5	Gempa Bumi	[20] Ekstrem	Mitigate	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain. Penanggulangan terhadap

Threat ID	Ancaman	Level Of Risk	Risk Response	Risk Treatment
				risiko dapat mengurangi efek pada dampak dan organisasi masih dapat berjalan seperti biasanya. • Asuransi seluruh <i>hardware</i> untuk mengurangi biaya dampak kerusakan.
T6	Banjir	[5] Moderat	Mitigate	• Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain. • Asuransi seluruh <i>hardware</i> untuk mengurangi biaya dampak kerusakan.
T1	Kebakaran	[12] Tinggi	Mitigate	• Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain. • Pengecekan fungsi keamanan fisik (FAP, FM200, APAR) untuk mengurangi dampak kebakaran dan cek fungsi alarm di setiap ruangan. • Asuransi seluruh <i>hardware</i> untuk mengurangi biaya dampak kerusakan.
T2	Kerusakan karena kebocoran	[10] Tinggi	Mitigate	• Perencanaan dan penerapan <i>disaster recovery</i> baik virtualisasi atau fisik dengan lokasi penyimpanan di tempat lain. • Pengecekan fungsi keamanan fisik (FAP, FM200, APAR) untuk mengurangi dampak kebakaran dan cek fungsi alarm di setiap ruangan. • Asuransi seluruh <i>hardware</i> untuk mengurangi biaya dampak kerusakan.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh proses penilaian *risk assessment* pada divisi teknologi informasi di Dinas ATR/BPN menggunakan ISO 27005:2008, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Hasil dari risk assessment berupa level of risk, dimana dalam level of risk terhadap ancaman yang perlu dimitigasi berdasarkan peta tingkat risiko di Kementerian ATR/BPN yaitu:
Pada jenis aset dokumen, diketahui ancaman yang perlu dimitigasi seperti badai dengan nilai risiko 16, gempa bumi dengan nilai risiko 20, banjir dengan nilai risiko 5. Pada jenis aset hardware, diketahui ancaman yang perlu dimitigasi seperti badai dengan nilai risiko 16, gempa bumi dengan nilai risiko 20, banjir dengan nilai risiko 5, kebakaran dengan nilai risiko 12, kerusakan karena kebocoran dengan nilai risiko 10. Nilai-nilai risiko tersebut (16,20,5,16,20,5,12,10) adalah hasil perkalian level likelihood terhadap level impact.
- B. Berdasarkan nilai risiko yang perlu dimitigasi terhadap masing-masing aset, maka akan dilakukan rekomendasi treatment sebagai kontrol yang dapat mengurangi tingkat kemungkinan ancaman terjadi dan dampaknya yaitu:
Perencanaan dan penerapan *disaster recovery* pada aset dokumen. Perencanaan dan penerapan *disaster recovery*, pengecekan fungsi keamanan fisik (FAP, FM200, APAR) untuk mengurangi dampak kebakaran dan cek fungsi alarm di setiap ruangan, lalu asuransi seluruh *hardware* untuk mengurangi biaya dampak kerusakan pada aset hardware. Risk Treatment ini adalah bagian dari penanganan yang bersifat risk mitigate (control).

REFERENSI

- [1] 27035:2011. (2011). *INTERNATIONAL STANDARD ISO / IEC Information technology — Security techniques — Information security incident management. 2011.*
- [2] Departemen Teknik Informatika, U. T. (2015). *Analisis Risiko Teknologi Informasi Berbasis Risk Management Menggunakan ISO 31000.* 2(2), 1–8. Retrieved from https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/102538/jurnal_eproc/analisis-risiko-teknologi-informasi-berbasis-risk-management-menggunakan-iso-31000-studi-kasus-i-gracias-telkom-university.pdf
- [3] ISACA. (2013). COBIT 5 For Risk. USA
- [4] ISO/IEC. (2014). *INTERNATIONAL STANDARD ISO / IEC 17788 E Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and Vocabulary 2014. 2014(E).*
- [5] Iso, B. S. (2011). Risk management — Principles and guidelines. *Engineering, 2009.*
- [6] ISO, I. S. O., 1, J. T. C. I. J., Technology, I., & Subcommittee SC 27, I. S. techniques. (2008). *Iso/Iec 27005:2008.* 3, 61. Retrieved from <http://www.iso.org>
- [7] Kementerian ATR/BPN(2019). *SKEP.16.P.BD.II.2019_Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.*